

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu akan dipaparkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul/ Peneliti/ Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	“Pengaruh Asimetri Informasi dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia)” Ilham Firdaus 2013	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: 1. Asimetri Informasi 2. CAR	Analisis Regresi Berganda	1. Asimetri Informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba 2. CAR berpengaruh secara signifikan negatif terhadap Manajemen Laba
2	“Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” Agung, dkk 2014	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Asimetri Informasi	Analisis Regresi Linear Berganda	Asimetri Informasi mempunyai pengaruh positif terhadap Praktik Manajemen Laba

Dilanjutkan...

Lanjutan...

3	<p>“Pengaruh Asimetri Informasi, Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba” Andreani, dkk 2015</p>	<p>Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: 1. Asimetri Informasi 2. Mekanisme <i>Corporate Governance</i>: a. Kepemilikan Institusional b. Proporsi Dewan Komisaris Independen c. Ukuran Dewan Komisaris 3. Beban Pajak Tangguhan</p>	<p>Analisis Linear Berganda</p>	<p>1. Asimetri Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Laba 2. Mekanisme <i>Corporate Governance</i>: a. Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh positif juga signifikan terhadap Manajemen Laba b. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak menjadi pengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba c. Ukuran Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Laba 3. Beban Pajak Tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba</p>
4	<p>“<i>Good Corporate Governance</i> (GCG) sebagai Pemoderasi Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Manajemen Laba” Sri, dkk 2016</p>	<p>Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Asimetri Informasi Variabel Moderasi: GCG</p>	<p>Analisis Regresi Moderasi</p>	<p>1. Asimetri Informasi menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif pada Manajemen Laba 2. GCG sebagai variabel pemoderasi, ternyata memperlemah pengaruh asimetri informasi pada Manajemen Laba</p>

Dilanjutkan...

Lanjutan...

5	<p>“<i>The Effect of Information Asymmetry (IA), Firm Size (FS), Leverage, Profitability and Employee Stock Ownership (ESO) on Earnings Management (EM) with Accrual Model</i>” Wiyadi, dkk 2015</p>	<p>Variabel Dependen: EM Variabel Independen: 1. IA 2. FS 3. Leverage 4. <i>Profitability</i> 5. ESO</p>	<p><i>Regression Models Analysis</i></p>	<p>1. <i>Information Asymmetry has positive effect on EM</i> 2. <i>Company Size is not a significant negative effect on EM</i> 3. <i>Leverage has not significant negative effect on EM</i> 4. <i>Profitability has not significant effect on EM</i> 5. <i>Employee Stock Ownership Program has negative effect on EM</i></p>
---	--	--	--	---

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel dependen, yaitu manajemen laba. Selain itu, juga terdapat perbedaan pada variabel independen, dimana dalam penelitian ini hanya menggunakan asimetri informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel moderasi yaitu *Good Corporate Governance*. Hal ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri, dkk, perbedaannya terletak pada indikator GCG yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini indikator GCG yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit, sedangkan pada penelitian Sri, dkk menggunakan perusahaan *go public* yang mengikuti survey CGPI sebagai indikator. Selain variabel yang digunakan dalam penelitian, penelitian ini juga berbeda dalam hal objek penelitian dengan penelitian terdahulu. Adapun dalam penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2017 sebagai objek penelitian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*agency theory*)

Teori keagenan memperlihatkan titik bertemunya *principal* dengan *agent*. (Rahmawati, 2012) mengungkapkan jika, “teori keagenan (*agency theory*) mengindikasikan bahwa adanya hubungan asimetri informasi antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemegang saham)”. Asimetri informasi ini muncul ketika, manajer selaku *agent* lebih memahami dan mengerti akan keseluruhan data internal perusahaan dan keberlangsungan perusahaan di masa mendatang ketimbang *stake holder* selaku prinsipal.

Menurut Sugiarto (2009), “*agency problem* akan muncul dengan bermacam tipe”, antara lain:

1. Konflik antara pihak manajemen dan *stake holders*
2. Konflik antara *stake holders* atas saham mayoritas dan *stake holders* atas saham minoritas
3. Konflik antara pemegang saham/ manajemen dengan kreditur

Penelitian ini mengarah pada masalah keagenan tipe pertama. Tipe tersebut menjelaskan, bahwa adanya konflik antara pihak manajemen dan *stake holders* atas pemberian informasi oleh manajemen. Ketimpangan informasi yang didapatkan *stake holders* ini yang dinamakan asimetri informasi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa, individu-individu akan memilih bertindak dengan tujuan memaksimalkan keuntungannya saja, hal itu mengakibatkan agen mempergunakan aspek asimetri informasi yang dipunyai untuk meng-*hidden* berbagai informasi perusahaan yang tidak dimengerti oleh prinsipal. Asimetri

informasi dan konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dengan agen (manajer) membuat agen melakukan penyajian data keuangan yang tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya kepada prinsipal, terutama bila informasi itu sangat berhubungan dengan penilaian kinerja agen. Hal itu memacu agen untuk berfikir bagaimana angka yang diperoleh dari sistem akuntansi itu bisa dipakai sebagai alat dalam memaksimalkan kepentingannya saja. “Salah satu tindakan yang diambil agen dalam situasi demikian disebut manajemen laba” (Wardhana, 2009).

2.2.2 Teori *Bid-Ask Spread*

Jika investor ingin membeli atau menjual suatu saham atau sekuritas lain dipasar modal, biasanya melakukan transaksi melalui broker/ *dealer* yang memiliki spesialisasi dalam suatu sekuritas. Broker/ *dealer* inilah yang menjual pada investor untuk harga ask jika investor ingin membeli suatu sekuritas. Jika investor sudah mempunyai suatu sekuritas dan ingin menjualnya, maka broker/ *dealer* ini yang akan membeli sekuritas dengan harga *bid*. Perbedaan antara harga *bid* dan harga *ask* adalah *spread*. Jadi *bid-ask spread* merupakan selisih harga beli tertinggi bagi broker/ *dealer* yang bersedia untuk membeli suatu saham dan harga jual dimana broker/ *dealer* bersedia untuk menjual saham tersebut. Penggunaan *bid-ask spread* sebagai proksi dari asimetri informasi menurut Komalasari (2010) dikarenakan dalam mekanisme pasar modal, pelaku pasar modal juga menghadapi masalah keagenan. Partisipan pasar saling berinteraksi di pasar modal guna mewujudkan tujuannya yaitu membeli atau menjual sekuritasnya, sehingga aktivitas yang dilakukan dipengaruhi oleh informasi yang diterima baik secara

langsung (laporan publik) maupun tidak langsung (*insider trading*). *Dealers* atau *market-makers* memiliki daya pikir terbatas terhadap persepsi masa depan dan menghadapi potensi kerugian ketika berhadapan dengan *informed traders*. Hal inilah yang menimbulkan *adverse selection* yang mendorong *dealers* untuk menutupi kerugian dari pedagang terinformasi dengan meningkatkan *spread*-nya terhadap pedagang likuid. Dengan demikian asimetri informasi yang terjadi antara *dealer* dan pedagang terinformasi tercermin pada *spread* yang ditentukannya (Komalasari, 2010).

2.2.3 Discretionary Accruals (DACC)

Salah satu pendekatan secara umum yang dihasilkan para peneliti untuk mendeteksi pengelolaan laba yaitu dengan model yang berbasis *aggregate accrual*. Model yang berbasis *aggregate accrual* yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa manajemen dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi pengelolaan laba. Model pengelolaan laba berbasis *aggregate accrual* sejalan dengan basis akuntansi yang selama ini banyak dipergunakan di berbagai negara yaitu akuntansi berbasis akrual (Sulistyanto, 2008).

Secara konseptual, akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui dan mencatat semua transaksi dan peristiwa berdasarkan waktu terjadinya dan bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Artinya, suatu transaksi sudah dapat diakui dan dicatat sebagai hak walaupun kas baru akan diterima pada periode berikutnya atau mengakui hak pada periode berikutnya walaupun kas telah diterima begitu juga dengan kewajiban. Hingga dalam

akuntansi berbasis akrual tidak semua transaksi dan peristiwa harus dilakukan secara tunai (Stice, 2009).

Model pengelolaan laba berbasis *aggregate accrual* merupakan model yang menggunakan komponen-komponen laporan keuangan yang secara langsung dideteksi sebagai obyek rekayasa akuntansi. Secara teoritis, akuntansi berbasis akrual mengakibatkan munculnya beberapa komponen non-kas dalam laporan keuangan. Misalkan hutang, piutang, penyusutan dan sebagainya atau dengan kata lain, komponen non kas merupakan penyebab munculnya komponen akrual dalam laporan keuangan. Komponen non kas inilah yang selama ini ditengarai dipakai sebagai obyek yang digunakan manajer ketika pengelola dan mengatur laba yang akan dilaporkannya. Hal ini bisa dilakukan karena manajemen mempunyai kebebasan untuk memilih metode, mengganti metode dan prinsip akuntansi untuk mencatat komponen-komponen tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya sehingga pengembangan model manajemen yang menggunakan komponen-komponen tersebut relatif dapat diterima karena sejalan dengan akuntansi berbasis akrual. *Discretionary accruals* merupakan selisih antara total akrual dan *non discretionary accruals*, yang merupakan komponen utama laba dalam akuntansi berbasis akrual (Sulistyanto, 2008).

Penelitian ini menggunakan model *discretionary accrual* dengan *modified Jones* dalam Kothari et al. 2005 yang dikutip oleh Tucker dan Zarowin 2005 sebagai indikator perataan laba. Model perhitungan *discretionary accrual modified Jones* tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.4 Asimetri Informasi

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan maksud untuk dipergunakan *stakeholders*, diantaranya juga pihak internal perusahaan seperti pihak manajemen, pegawai, tenaga upah dan pihak lainnya. Beberapa pihak yang paling bergantung pada laporan keuangan adalah para pihak eksternal perusahaan seperti, pemilik saham, kreditur, pemerintah, atau masyarakat. Para manajemen telah mengerti setiap kejadian yang berlangsung di perusahaan, sedang pihak eksternal perusahaan yang tidak secara langsung berada dan berinteraksi dengan perusahaan, tidak memahami segala informasi maupun kondisi perusahaan sesungguhnya, sehingga prosentase dependensi pihak eksternal akan jauh lebih besar dibandingkan pihak manajemen. Ketergantungan terhadap informasi perusahaan membuat *principal* hanya bisa menunggu *agent* untuk pemenuhan informasi yang dibutuhkan serta mengetahui kondisi perusahaan sesungguhnya. Dalam kondisi seperti ini dapat mengakibatkan munculnya asimetri informasi, dimana agen mempunyai informasi lebih ketimbang *principals* atau para pemilik saham.

Asimetri informasi terbagi pada dua jenis (Scott, 2009), antara lain:

1. *Adverse selection*, yaitu pihak manajemen dan pihak intern perusahaan lainnya biasanya lebih memahami dan mengetahui mengenai keadaan dan posisi perusahaan, juga prospeknya di masa datang dibandingkan pihak eksternal. Tidak menutup kemungkinan juga, akan memunculkan fakta-fakta yang disembunyikan kepada *principal*.

2. *Moral hazard*, adalah aktivitas yang dikerjakan oleh manajer tidak secara menyeluruh dimengerti oleh investor (pemegang saham dan kreditur), sehingga pihak manajemen dapat dengan leluasa bertindak diluar pengetahuan pemilik saham, yang melewati batas kontrak, dimana secara *attitude*, etika maupun norma tidak pantas untuk dilakukan.

Dalam penyajian informasi akuntansi, terkhusus pada *financial statements*, agen juga memiliki informasi dengan tingkat fleksibilitas lebih tinggi dalam dampaknya pada pelaporan keuangan guna memaksimalkan keperluannya. “Tujuan pembuatan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai keadaan atau posisi keuangan perusahaan, kinerja juga peralihan posisi *financial* dalam periode tertentu, yang bermanfaat bagi pemakai informasi *financial* dalam pengambilan keputusan ekonomi” (IAI, 2009). Dengan terjadinya kondisi asimetri ini, agen bias dengan mudah mengubah angka-angka tertulis dalam akuntansi yang dituangkan dalam laporan keuangan dengan mengambil langkah untuk mengatur atau mendilusi laba (*earnings management*).

Dalam penelitian ini, perhitungan asimetri informasi menggunakan *bid-ask spread* sebagai indikator:

$$SPREAD = (aski,t - bidi,t) / \{(aski,t + bidi,t) / 2\} \times 100$$

(Komalasari, 2010)

2.2.5 Manajemen Laba

Muliati (2011) menyatakan, “Definisi manajemen laba merupakan intervensi yang bermaksud tertentu pada proses pelaporan keuangan eksternal yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sifatnya pribadi

sebagaimana dijelaskan”. Tindakan manajemen laba memperlihatkan bahwa, laba yang dilaporkan tidak sama dengan posisi ekonomi yang sesungguhnya, sehingga laba yang disajikan tersebut bisa saja lebih tinggi ataupun lebih rendah. Pelaporan laba yang tidak menggambarkan kondisi/ posisi ekonomi dilakukan hanya semata keinginan pihak manajemen agar manajemen terlihat memiliki kinerja baik.

Menurut Sulistyanto (2008), “Manajemen laba adalah aktivitas pihak manajerial yang bermaksud memberikan pengaruh dan mengintervensi laporan keuangan perusahaan”. Apabila manajer melakukan manajemen laba, yaitu memutuskan metode/ sistem dan standar akuntansi yang akan diterapkan dan hal itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang mana tersaji dalam laporan keuangan, maka langkah ini bukan termasuk kecurangan dan kesalahan pihak manajemen. Namun pemerhati lain, khususnya para praktisi yang menganggap jika selama tindakan manajer untuk mengubah laporan keuangan itu dilakukannya hanya untuk mendapatkan keuntungan baginya, dengan menggunakan kesempatan atas ketidakpahaman principal akan informasi mengenai keadaan perusahaan sesungguhnya, maka tindakan manajemen laba ini dikatakan termasuk kecurangan manajer.

Sulistyanto (2008) juga menjelaskan, “Tujuan manajemen adalah untuk mengaburkan pemahaman para pemakai informasi laporan keuangan”. Secara konseptual, upaya menutupi, menunda waktu pengungkapan dan mengubah data atau informasi keuangan dilakukan oleh manajer guna mengelabui para pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan dan kondisi, serta kinerja perusahaan. Alasannya, upaya itu ditempuh oleh manajer dengan maksud untuk menyesatkan

pihak-pihak yang ingin mengerti dan memberi penilaian atas kinerja dan kondisi perusahaan.

“Ada banyak langkah yang bisa ditempuh oleh manajer dalam usahanya untuk mengubah dan mempengaruhi laporan keuangan” (Sulistyanto, 2008), antara lain:

- a. Pemilihan metode yang tepat, juga mengacu pada SAK
- b. Memberikan kontrol pada berbagai transaksi akrual

Discretionary total accruals sebuah perusahaan pada tahun tertentu dihitung dengan meregresi total akrual sebagai variabel dependen. Perhitungannya dapat dirumuskan sebagai berikut (Sulistyanto, 2008):

$$\mathbf{TACCit = EBXTit - OCFit \dots\dots\dots (1)}$$

$$\mathbf{TACCit/TAi,t-1 = \beta1 (1/TAi,t-1) + \beta2 (\Delta REVit/TAi,t-1) + \beta3 (PPEit/TAi,t-1)\dots\dots\dots (2)}$$

Dari persamaan regresi di atas, NDACC dihitung dengan menambahkan kembali koefisien-koefisien β .

$$\mathbf{NDACCit = \beta1 (1/TAi,t-1) + \beta2 ((\Delta REVit - \Delta RECit)/TAi,t-1) + \beta3 (PPEit/TAi,t-1)\dots\dots\dots (3)}$$

$$\mathbf{DAit = (TACCit/TAi,t-1) - NDACCit \dots\dots\dots (4)}$$

2.2.6 Good Corporate Governance (GCG)

Corporate governance merupakan konsep yang bisa dimanfaatkan dalam upaya peningkatan efisiensi ekonomis, yang meliputi adanya beberapa kaitan antara manajer perusahaan, direksi, para pemilik saham, pemerintah, karyawan dan pihak berkepentingan perusahaan lainnya. *Corporate governance* juga

merupakan pemberi fasilitas atas penetapan target-target perusahaan, serta menjadi langkah dalam mengambil keputusan untuk teknik monitoring kinerja.

Watts (2013) mengungkapkan, “Salah satu langkah yang tepat untuk melakukan monitoring terhadap problematika kontrak dan pembatasan dalam perilaku *opportunistic* pada manajemen yaitu *corporate governance*”. Berkenaan pada masalah tentang keagenan, *corporate governance* yang mempunyai makna konsep yang didasarkan kepada teori keagenan (*agency theory*), diharapkan bisa berguna sebagai upaya dalam pemberian keyakinan/ kemantapan para investor bahwa, para investor akan memperoleh pengembalian atas uang/ modal yang telah mereka tanam atau investasikan.

Menurut Sulistyanto (2008), “Menciptakan lingkungan bisnis yang sportif, rapi, bersih dan bertanggungjawab dapat diwujudkan dengan melaksanakan empat prinsip *corporate governance* dengan konsisten”, yaitu:

1. Keadilan

Keadilan ini menggambarkan upaya proteksi pada seluruh hak para pemilik saham, termasuk pihak yang memiliki saham minoritas (*minority shareholder*). Perolehan informasi dan data secara *ontime* juga teratur, memberi kesempatan pemegang saham untuk bersuara dalam rapat, menetapkan jajaran direksi, komisaris serta pengalokasian laba perusahaan.

2. Transparansi

Transparansi mempunyai arti, pengungkapan (*disclosure*) tiap keputusan atau regulasi yang diimplementasikan perusahaan, karena tumpuan para penanam

saham dan efisiensi pasar sangat bergantung pada hasil kinerja perusahaan dengan adil, valid dan *ontime*.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas didasarkan pada sistem *internal checks and balances* yang melingkupi praktik audit dan diwujudkan melewati beberapa tahap *controlling* secara efektif dan dilandaskan pada keseimbangan otoritas antara pemilik saham, dewan komisaris, pihak manajemen serta pihak yang bertugas melakukan audit.

4. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan tanggungjawab perusahaan mematuhi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk keputusan tentang lingkungan hidup, melindungi konsumen, masalah perpajakan, ketenagakerjaan, larangan untuk monopoli, menerapkan persaingan yang sehat, kesehatan juga keselamatan kerja ataupun aturan-aturan lain mencakup keberlangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan setiap kegiatan usaha.

Dalam penelitian ini, perhitungan variabel GCG sendiri menggunakan (Andreani, dkk, 2015):

$$\text{GCG} = \text{Total UDK} + \text{Total UKA}$$

2.2.7 Dewan Komisaris

“Dewan komisaris ialah pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan dorongan agar diterapkannya prinsip GCG didalam perusahaan melalui penguatan dewan komisaris supaya bisa melakukan tugasnya dalam pengawasan dan

memberi saran kepada manajer secara efektif dan terlebih dalam pemberian nilai tambah untuk perusahaan” (Sulistyanto, 2008).

Untuk itu, ada tugas-tugas dan beberapa tanggungjawab yang harus dilakukan dewan komisaris yang bermaksud memastikan, bahwa perusahaan:

- a. Mempunyai taktik bisnis efektif, termasuk memantau jadwal, anggaran dan efektivitas atas taktik tersebut
- b. Melakukan pengangkatan eksekutif dan pemilihan manajer secara profesional
- c. Mempunyai informasi, sistem pengawasan serta sistem audit yang berkontribusi pekerjaannya dengan baik
- d. Mematuhi aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ataupun beberapa nilai yang diputuskan perusahaan untuk menjalankan operasinya
- e. Risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi serta dikendalikan dengan baik
- f. Beberapa prinsip dan praktik GCG ditaati dan diterapkan dengan baik

2.2.8 Komite Audit

Sulistyanto (2008), “Komite audit merupakan pihak yang memiliki tugas untuk membantu komisaris dalam hal melakukan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal maupun eksternal audit”. Komite audit mempunyai tugas dalam pengawasannya terhadap peningkatan efektivitas demi mewujudkan transparansi pelaporan keuangan yang berkualitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *controlling* internal yang memadai.

Dalam upaya peningkatan kualitas *financial statements*, maka komite audit memiliki peran dan tanggungjawab antara lain:

1. Melakukan pengawasan, apakah tahapan penyusunan serta pelaporan keuangan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan kebijakan keuangan.
2. Menelaah, apakah laporan keuangan telah menyesuaikan dengan ketentuan standar dan kebijakan serta konsisten pada informasi dan data lain yang dimengerti oleh audit.
3. Melakukan *controlling* pada pengerjaan audit atas laporan keuangan oleh auditor eksternal dan memberi penilaian mengenai mutu pekerjaan dan kewajaran biaya audit (*auditor's fee*) yang diajukan auditor eksternal.

Selain itu, komite audit juga mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan *controlling* independen terhadap proses penerapan tata kelola perusahaan. Untuk itu, komite audit memiliki peran tersendiri serta tanggungjawab antara lain:

1. Melaksanakan *controlling* pada proses implementasi tata kelola perusahaan.
2. Memastikan jika pihak manajemen senior aktif memberikan pengarahan tentang budaya *corporate governance*.
3. Mengawasi bahwa *code of conduct* telah diterapkan secara konsekuen.
4. Memahami segala titik permasalahan dan *issues* yang kemungkinan dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan maupun non finansial perusahaan.

5. Memantau perusahaan bahwa, perusahaan sudah patuh pada peraturan perundang-undangan berlaku.
6. Mewajibkan auditor internal untuk memberikan laporan tertulis tentang hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan dan temuan-temuan lain.

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit harus terdiri atas sekurang-kurangnya tiga anggota bersama ketua komite audit. Anggota komite yang berasal dari komisaris diperlukan hanya 1 orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan yang juga tercatat sebagai ketua komite audit. Anggota lain yang bukan berasal dari komisaris independen, pihak tersebut harus merupakan pihak eksternal yang independen.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba

“Kondisi asimetri informasi ini berakibat pada munculnya *moral hazard* yang berupa upaya pihak manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba” (Agung, dkk., 2014). Seperti telah diketahui, bahwa laporan keuangan bersifat penting sekali untuk pihak eksternal, karena pihak eksternal berada pada posisi paling dominan ketidakpastiannya. Berbeda dengan pihak eksternal, pemakai informasi keuangan dari pihak internal perusahaan berkaitan secara langsung dengan perusahaan, sehingga pihak internal lebih mengerti setiap kejadian dan realitas kondisi perusahaan. Perbedaan itulah yang menimbulkan terjadinya kondisi asimetri informasi. Asimetri informasi sendiri tumbuh ketika, manajemen

perusahaan lebih mengerti dan memahami semua data dan informasi yang menggambarkan posisi perusahaan yang sesungguhnya, bahkan prospek perusahaan di masa datang tidak dimengerti pemegang saham atau *stake holder*. Dengan informasi dan data yang digenggam pihak manajemen perusahaan, hal ini membuat manajer tergoda untuk menerapkan langkah yang dapat mencerminkan hasil maksimal perusahaan bagi *principal*, yang mana hal itu justru tidak menggambarkan posisi perusahaan sebenarnya, terutama informasi mengenai kinerja perusahaan dan kinerja keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam keadaan asimetri yang demikian, agen bisa dengan mudah mengubah angka-angka akuntansi tertulis didalam laporan keuangan dengan mencoba mempraktikkan manajemen laba.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sri, dkk (2016), "Asimetri informasi merupakan konflik yang terjadi antara agen dan principal". Asimetri informasi terjadi karena adanya perbedaan informasi dan data antara pihak satu dan lainnya, sehingga pada keadaan demikian dapat menimbulkan terjadinya tindakan oportunistis yaitu, manajemen laba.

Menurut Agung, dkk (2014) dan Wiyati, dkk (2015), dalam penelitiannya menggambarkan bahwa, asimetri informasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada praktik manajemen laba. Akan tetapi, hasil penelitiannya berbeda dengan penelitian Andreani, dkk (2015) dan Ilham Firdaus (2013), bahwa "Asimetri informasi tidak berpengaruh secara signifikan pada manajemen laba".

2.3.2 Ukuran dewan komisaris, asimetri informasi dan manajemen laba

Dengan adanya *agency problems* (masalah keagenan), dengan jumlah/ ukuran dewan komisaris yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan menyebabkan kesulitan dalam melakukan perannya. Diantara kesulitan tersebut yaitu, ketika berkomunikasi dan menyampaikan arahan kerja. Apabila jumlah dewan komisaris terlalu banyak, akan kesulitan ketika melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen. Sedangkan, apabila jumlah dewan komisaris terlalu sedikit, akan kurang dalam memaksimalkan perannya sebagai dewan komisaris dalam perusahaan. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, tetapi juga tidak mengabaikan efektivitas pengambilan keputusan. Apabila jumlah dewan komisaris sudah sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing, maka prosentase perusahaan dalam kemungkinannya manajer untuk bertindak dalam pemanipulasian atau manajemen laba. Akan tetapi, menurut Andreani, dkk (2015) bisa saja terjadi kondisi, dimana dewan komisaris kurang memahami bisnis perusahaan, sehingga menciptakan peluang bagi manajer perusahaan untuk mengaburkan konflik yang muncul di perusahaan dan adanya kemungkinan bahwa pembentukan dewan komisaris hanya untuk memenuhi regulasi. Berdasarkan penelitiannya juga, Andreani, dkk (2015) menyatakan bahwa, “Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba”.

2.3.3 Ukuran komite audit, asimetri informasi dan manajemen laba

Sulistyanto (2008) mengatakan, “Fungsi komite audit adalah untuk mewujudkan iklim disiplin dan pengawasan yang dapat menurunkan prosentase kemungkinan timbulnya penyelewengan-penyelewengan”. Oleh karena itu, adanya komite audit ini sangat penting untuk pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan penghubung antara pemilik saham dan dewan komisaris dengan manajer dalam mengatasi masalah keuangan perusahaan. Dengan adanya komite audit, membantu dewan komisaris mempermudah pengawasannya terhadap manajer mengenai penyampaian laporan keuangan secara wajar dan memastikan laporan tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, dengan keberadaan komite audit, struktur pengendalian internal perusahaan dapat terlaksana dengan maksimal, pelaksanaan *internal audit* maupun eksternal akan diterapkan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut atas temuan audit akan diperbaiki oleh manajemen dengan cepat dan tepat. Dengan begitu, akan diketahui seberapa pengaruh komite audit dalam upayanya meminimalisir tindakan manajemen laba yang diterapkan manajer.

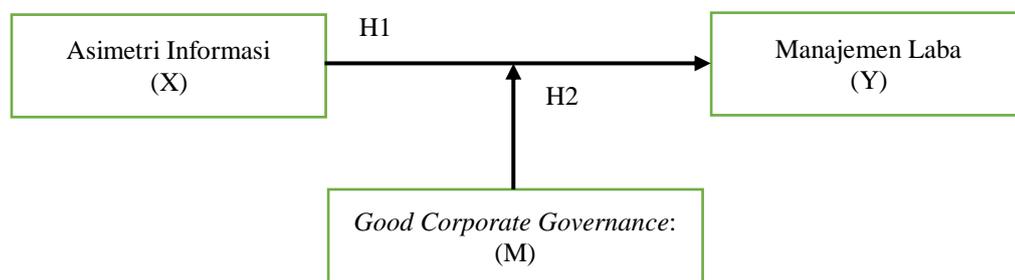
Berdasarkan penelitian oleh Sri, dkk (2016), “*Good corporate governance* sebagai variable moderasi yang didalamnya juga terdapat peran komite audit dalam implementasinya memperlemah pengaruh asimetri informasi pada manajemen laba.

2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian mengenai pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba merupakan topik yang sangat menarik untuk dikaji ulang, dimana asimetri

informasi sebagai variabel independen dan manajemen laba sebagai variabel dependen. Beberapa penelitian yang membahas pengaruh asimetri informasi pada manajemen laba diatas telah menggambarkan bahwa, terdapat hubungan diantaranya keduanya. Disini peneliti menambahkan GCG sebagai variabel moderasi dengan indikator pendukung, yaitu: dewan komisaris dan komite audit.

Secara diagramatik, model penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model kerangka konseptual

2.5 Hipotesis

Berdasarkan beberapa dasar teori yang dijabarkan, kerangka konseptual dan lain-lain, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016 - 2017.

H₂: *Good corporate governance* memperkuat atau memperlemah pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016 - 2017.